



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ ATAU WALI
KOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN
DALAM KONDISI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan
Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MEGA WARDANI
NIM. 11720725026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
144 H/2021M**

LEMBAR PERSETUJUAN

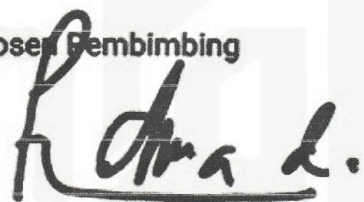
Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19)"** yang di tulis oleh:

Nama	:MEGA WARDANI
NIM	:11720725026
Program Studi	:Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Lovelly Dwina Dahen, S.H.,M.H.
NIP.198206222011012006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI COVID-19”** yang ditulis oleh :

Nama	: MEGA WARDANI
NIM	: 11720725026
Program Studi	: Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :	
Hari / Tanggal	: Rabu, 28 Juli 2021
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid- 19”. Dengan adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) pelaksanaan kampanye di lakukan dengan media social dan daring Jika metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka melalui media social dan media daring tidak dapat di lakukan maka dapat di laksanakan sesuai pasal 58 ayat 2 PKPU No 13 Tahun 2020. Di Kabupaten Indragiri Hulu masih adanya pelanggaran yang di lakukan pasangan calon yang terletak pada Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Pasir Penyu .

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 dan Bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitan yang bertitik tolak dari data primer dan data sekunder yang melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh data di antaranya KPU,Camat,PPK,dan Panwascam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Lokasi penelitian ini Di Kabupaten Indragiri Hulu .

Dalam penelitian ini dapat di ketahui Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 mengutamakan Media Social dan Media Daring. Jika Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon tidak dapat melaksanakan dengan Media Social dan Media Daring di karenakan akses jaringan, maka bisa melakukan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog dengan di hadiri maksimal 50 orang dan memperhatikan pertokol kesehatan. Sebelum melaksanakan kampanye Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon wajib memiliki STTP (Surat Tanda Terimah Pemberitahuan) Kampanye yang di keluarakan oleh Pihak Kepolisian.

Tindakan atas pelanggaran kampanye yang ada di Kecamatan Peranap yang di lakukan oleh pada pasangan calon No urut 2 Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rahcmat melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a dan b PKPU No 13 Tahun 2020,Kecamatan Batang Cenaku yang di lakukan pasangan calon Pasagan Calon Nomor Urut 04 Wahyu Adi- Suriati yang melanggar Pasal 58 huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 yaitu berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP dan Kecamatan Pasir Penyu yang di lakukan Pasangan calon Nomor urut 5 yakni Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 dan tanpa STTP telah di beri sanksi peringatan tertulis dan di lakukan pembubaran kampanye.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid- 19”**. Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Suardi dan Ibunda Suarni serta Kakek Syamsuddin dan Nenek Siti Aisyah yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.

Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H.,M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Helmi Basri, Dr., H.,Lc.,M.A. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 9 Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
- 10 Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
- 11 Teman-teman Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) UIN SUKSA RIAU yang telah berjuang bersama terkhusus senior memberikan dukungan, nasehat-nasehat serta mau bertukaran pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 12 Kepada aparat yang bertugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam mengumpulkan dan memperoleh data skripsi penulis
- 13 Arjuna yang telah meluangkan waktu, tenaga, materi untuk menemani penulis dalam penelitian skripsi di Kabupaten Indragiri Hulu.
- 14 Tak lupa pula terimakasih banyak kepada Lucy Anggraini S.H selaku teman Ilmu Hukum D dan Firman yang telah membantu penelitian penulis di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

MEGA WARDANI
NIM. 11720725026



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Keadaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu	15
B. Sejarah Perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu	16
C. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu	19
D. Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan	20
E. Status Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu	23
F. Jumlah Pemilih Kabupaten Indragiri Hulu	24
G. Organisasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Teori Demokrasi	28
B. Teori Pemilihan Umum	32

C. Teori Strategi Pemenangan.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid-19.....	51
B. Tindakan Yang Di Lakukan Atas Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam kondisi Covid-19	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1	: Tabel Populasi dan Sampel 10
Tabel II. 1	: Prasarana Pendidikan 19
Tabel II. 2	: Prasarana Peribadatan 21
Tabel II. 3	: Status Pekerjaan Utama Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas /(Jiwa)..... 22
Tabel IV. 4	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Serentak Lanjutan Tahun 2020 23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu agenda rutin yang mengandung langkah strategis bagi terciptanya transisi politik untuk pemerintahan Indonesia di masa depan. Persoalan Pilkada bukan hanya terbatas pada karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun dinamika dan prosesi pelantikan semata. Keutamaan dari adanya Pilkada adalah dalam merangsang kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat di tiap-tiap daerah melalui berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan.¹

Menurut Harris .Warren dan kawan kawanya (1963) ,Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka.serta memutuskan,apa yang pingin pemerintah lakukan untuk mereka .Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan pingin mereka jaga.²

Menurut Rogers dan Storey mengemukakan bahwa Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalanyak yang di lakukan secara berkelanjutan pada turun waktu tertentu.³

Pada masa darurat akibat pandemi Covid-19 saat ini, segala manuver dan mekanisme politik menjadi lebih riskan. Para pelaku politik sudah pasti memiliki

¹ Singgih Choirl Rizki dan Yusuf Adam Hilman, *Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada serentak di tengah Covid 19*, Volume 4, No 2, 2020), Hlm.145.

² Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), Hlm.135

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : PrenamediaGroup, 2018), Hlm. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strateginya sendiri untuk terus mengerahkan massa, karena tujuannya adalah memenangkan kompetis. Strateginya sendiri untuk terus mengerahkan massa, karena tujuannya adalah memenangkan kompetisi.⁴

Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penetapan keadaan darurat ini masih dalam lingkup Staatsnoodrecht, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat (Asshiddiqie, 2012). Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarugptan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ⁵ yang di menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corana Virus Disease 2019 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. termasuk tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 .⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan seluruh Tahapan, Program , dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak harus di laksanakan sesuai dengan protocol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19), protocol kesehatan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan

⁴ Singgih Choiril Rizki dan Yusuf Adam Hilman, *Loc. cit*, Hlm. 145.

⁵ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarugptan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid- 19).

⁶ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, *Urgensitas Perpu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*, Volume 4, No 1, 2020, Hlm. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁷

Penyelenggaraan Kampanye akan di laksanakan Pada Tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi masa Kampanye ini dengan tiga agenda yaitu⁸ :

1. Pertemuan Terbatas ,pertemuan tatap muka dan dialog,penyebaran bahan Kampanye kepada umum,pemasangan alat peraga dan kegiatan lainnya
2. Debat Publik/Terbuka antarpasangan calon,Kampanye ini melalui Media Massa,Cetak dan,Elektronik.
3. Masa tenang dan pembersihan alat peraga.

Aturan pelaksanaan kampanye di atur pada pasal 58 (1) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.⁹

Jika metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka melalui media social dan media daring tidak dapat di lakukan maka metode

⁷ Halloriau.com,KPU Resmikan Jadwal Pilkada Serentak 2020,Kampanye Mulai 26 September,(<https://m.halloriau.com/read13120120200613kpuresmikanjadwalpilkadaserentak2020kampanyemulai26september.html>, Di akses pada 13 Juni 2020.)

⁸ Ibid.

⁹ Lihat Peraturan Koimisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nomalam corona virus disease 2019 (Covid 19).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kampanye dilaksanakan sesuai dengan pasal 58 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut¹⁰ :

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
- b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
- c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
- e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Jika di dalam agenda pilkada khususnya pada tahapan kampanye terdapat pihak yang melakukan pelanggaran maka akan di berikan peringatan secara tertulis dan jika pihak bersangkutan tetap tidak mematuhi protokol kesehatan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan

¹⁰ *Ibid*, Hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 88A Ayat (2) dan (3).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifudin menyatakan ada 2.584 kegiatan pasangan calon yang pelanggaran protokol kesehatan sepanjang masa kampanye Pilkada 2020 Sedangkan sejak tanggal 26 September 2020 Tahapan Pelaksanaan Kampanye Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 8 pelanggaran, yakni 5 pelanggaran kampanye tanpa STTP (Surat Tanda Terimah Pemberitahuan Kampanye) dan 3 pelanggaran kampanye di luar ruangan

.¹¹

Sementara itu menurut catatan Ketua Bawaslu Riau, Rusdi Rusdan mencatat terdapat pelanggaran semasa kampanye yang di lakukan oleh para calon bupati, Melalui Panwascam Pasir Penyu dan surat peringatan diberikan kepada masing-masing pasangan calon nomor urut 05, yakni Rizal Zamzami - Yoghi Susilo karena melanggar Pasal 88 huruf d PKPU Nomor 13 Tahun 2020 karena melakukan kampanye diluar ruangan dan Paslon Nomor Urut 04 Wahyu Adi-Suriati yang melanggar Pasal 88 c PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yaitu berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP dan di berikan peringatan tertulis oleh panwaslu Kecamatan Batang Cenaku.¹²

Panwaslu Kecamatan Peranap memberikan Peringatan Tertulis kepada Penanggung Jawab kampanye Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Rezita

¹¹ Riuain.com, Bawaslu Proses 23 Pelanggaran Kampanye 9 Pilkada di Riau, (<https://www.riuin.com/amp/read-18567-2020-10-16-bawaslu-proses-23-pelanggaran-kampanye-9-pilkada-di-riau.html>, Di akses pada 16 Oktober 2020).

¹² Gatra.com, Ssst! Ada Pelanggaran Pemilu di Inhu, (<https://www.gatra.com/detail/news/494833/politik/ssst-ada-pelanggaran-pemilu-di-inhu>, Di akses pada 07 November 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meylani Yopi – Junaidi Rachmat di Kelurahan Peranap beberapa hari yang lalu, pada Sabtu (21/11/2020). pada sekira pukul 20.00 WIB, terlihat kehadiran massa lebih dari 50 orang. Selain itu terlihat adanya kegiatan di luar rumah dengan menggunakan tenda. Dalam kegiatan kampanye turut hadir Gubernur Riau H. Syamsuar dan Bupati Inhu Yopi Arianto. Yopi – Junaidi Rachmat di Kelurahan Peranap beberapa hari yang lalu, pada Sabtu (21/11/2020). pada sekira pukul 20.00 WIB, terlihat kehadiran massa lebih dari 50 orang. Selain itu terlihat adanya kegiatan di luar rumah dengan menggunakan tenda. Dalam kegiatan kampanye turut hadir Gubernur Riau H. Syamsuar dan Bupati Inhu Yopi Arianto.¹³

Berkaca dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tentang **“Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid- 19”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan. penelitian ini di fokuskan pada Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19.

¹³ Bawaslu, *Panwaslu Kecamatan Peranap Berikan Peringatan Tertulis Kampanye Paslon Nomor Urut 2*, (<https://indragirihulu.bawaslu.go.id/>, Di ases pada 24 November 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut ,maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 ?
- b. Bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 .
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 .

3. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19..

b. Secara Akademis

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tujuan tertentu¹⁴ cara berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional empiris dan sistematis .Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal ,empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹⁵

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹⁶

1. Metode Penelitian

Metode penelitian di lihat dari jenisnya penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan observasi wawancara dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survei ke lapangan melalui responden dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Indragiri Hulu.

¹⁴ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999), Hlm.89

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), Hlm.24.

¹⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010), Hlm.35.

¹⁷ Masri Singaribun, Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta : LP3ES,1989), Hlm.35

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁸

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁹

Tabel 1.1

Tabel Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	KPU (Komisi Pemilihan Umum)	1	1	100 %
2.	Camat	3	3	100 %
3.	PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	15	9	60 %
4.	Panwascam	9	3	33,33 %
Jumlah		28	16	58 %

Berdasarkan Tabel 1.1 penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), Hlm.122

¹⁹ *Ibid*, Hlm.124

Indragiri Hulu, tiga Camat dari tiga Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Pasir penyus, sembilan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang terdiri ketua dan dua anggota PPK perkecamatan dan tiga ketua Panwascam perkecamatan.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai objek penulis dalam meneliti dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung karena peneliti memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang di peroleh dari Tempat penelitian yang dilakukan.²⁰

c. Data Tersier

Data Tersiernya adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu di lakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data data yang valid dalam peneliti .peneliti menggunakan metode metode sebagai berikut :

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafindo, 2006) Hlm.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.²¹

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin diteliti.

c. Studi Perpustakaan

Peneliti mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.²²

7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut dideskripsikan (dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut di gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, metode penelitian, serta

²¹ Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm.131

²² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada), Hlm.31

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sisematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian :

- A. Teori Demokrasi
- B. Teori Pemilu
- C. Teori Strategi Pemenangan

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi:

Bagaimana Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 serta bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang Kesimpulan dan Saran .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 8.195,26 Km² atau 819.826 hektar. Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada posisi 00 15' Lintang Utara – 1 0 53' Lintang Selatan dan 101° 10' Bujur Timur - 102° 48' Bujur Timur.²³

Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera dengan posisi Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tebo Provinsi Jambi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Ibu kota kecamatan dengan jarak terjauh dari ibu kota kabupaten adalah Ibu kota kecamatan batang Peranap dengan jarak 96 km, sedangkan jarak terdekat dengan ibu kota kabupaten adalah ibukota kecamatan rentang yaitu 0 km.

Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, rawa-rawa dengan ketinggian 5 – 400 m dari permukaan laut dan berada pada jalur lintas timur Sumatera. Secara astronomis posisi Kabupaten Indragiri Hulu terletak di daerah tropis maka otomatis beriklim tropis/ tropika basah dengan suhu yang

²³RPIJM,BidangCiptaKaryaKabupatenIndragiriHulu,(HULUhttp://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1507844423RPIJM_Inhu__BAB_2_Profil_Kab-Kota.pdf). Diakses pada tanggal 13 Januari 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

relatif tinggi, minimum 21,4° Celcius dan maksimum 32,8° Celcius. Kondisi udara lembab dengan curah hujan sekitar 2.448,94 mm per tahun. Rona fisik dasar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sangat diwarnai oleh keberadaan Sungai Indragiri yang mengalir dari arah barat ke timur yang melintasi bagian tengah agak ke utara di wilayah ini.

Secara topografis ketinggian tempat di tepi Sungai Indragiri pada bagian paling hilir (Kuala Cenaku) adalah sekitar 5 m di atas permukaan laut (dpl), dan di bagian yang paling hulu (Peranap) adalah sekitar 38 meter dpl. Ketinggian semakin meningkat hingga ke perbukitan di perbatasan, dan yang tertinggi adalah di kompleks Bukit Tiga puluh di Kecamatan Batang Gansal, yaitu 800 m dpl lebih sedikit.²⁴

B. Sejarah Perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 di bentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 Nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 di bentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi.²⁵

²⁴ *Ibid*, Hlm,9.

²⁵ Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu ,(<https://inhukab.go.id/tentang-inhu/> Di akses Tanggal 13 Januari 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Di bentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah di dua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
 - a. Kec. Rengat Ibu kota Rengat
 - b. Kec Pasir Penyu ibu kota Air Molek
 - c. Kec Seberida ibu kota Pangkalan Kasai
 - d. Kec. Peranap ibu kota Peranap
 - e. Kec. Kuantan Hilir ibu kota Baserah
 - f. Kec kuantan tenah ibu kota Taluk Kuantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- g. Kec. Kuantan Mudik ibu kota Lubuk Jambi
- h. Kec. Singingi ibu kota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibu kota Bena
2. Kec. Kelayang ibu kota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibu kota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

1. Kec. Rengat ibu kota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibu kota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibu kota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, ibu kota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, ibu kota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyu, ibu kota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibu kota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibu kota Simpan Kelayang
9. Kecamatan Peranap ibu kota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibu kota Pematang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu

1. Visi : Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, berbudaya dan agamis tahun 2020.

2. Misi :

- a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai IPTEK
- b. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.
- d. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.
- e. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor produksi serta membuka peluang pasar

- f. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah

D. Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan.

1. Prasarana Pendidikan

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu yang memiliki jumlah penduduk usia sekolah relative banyak ,berdasarkan Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun menurut Partisipasi Sekolah (Persen) tahun 2017 oleh karena itu di Kabupaten Indragiri Hulu di perlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk setempat.adapun prasarana pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang terdapat sebagai berikut :²⁶

Tabel II. 1

Prasarana Pendidikan

NO	KECAMATAN	JENIS PENDIDIKAN						
		SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	Sekolah Tinggi
1	Peranap	27	-	5	1	2	1	-
2	Batang Peranap	10	-	2	-	-	-	-

²⁶ Badan statistic Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Seberida	27	2	6	3	2	3	-
4	Batang Cenaku	28	2	6	2	1	1	-
5	Batang Gansal	20	2	3	2	1	-	-
6	Kelayang	21	-	5	1	2	2	-
7	Rakit Kulim	24	1	4	1	2	-	-
8	Pasir Penyu	23	-	6	2	3	2	-
9	Lirik	15	1	4	1	2	-	-
10	Sungai Lala	12	-	3	2	2	1	-
11	Lubuk Batu Jaya	13	2	3	2	1	-	-
12	Rengat Barat	31	3	5	3	2	2	-
13	Rengat	32	1	6	3	4	2	2
14	Kuala Cenaku	13	2	3	2	-	1	-
INDRAGIRI HULU		296	16	61	25	24	15	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Prasarana Peribadatan

Prasarana peribadatan di Kabupaten Indragiri Hulu seperti dijelaskan pada tabel berikut.²⁷

²⁷ Ibid

Tabel II. 2
Prasarana Peribadatan

NO	KECAMATAN	JENIS PENDIDIKAN					
		Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja khatolik	Pura	Vihara
1	Peranap	35	45	-	-	-	-
2	Batang Peranap	15	10	-	-	-	-
3	Seberida	31	65	-	-	-	-
4	Batang Cenaku	42	93	-	-	-	-
5	Batang Gansal	29	30	1	1	-	-
6	Kelayang	32	39	-	-	-	-
7	Rakit Kulim	21	28	1	-	-	-
8	Pasir Penyu	22	41	3	-	-	-
9	Lirik	32	31	-	-	-	-
10	Sungai Lala	20	19	-	-	-	-
11	Lubuk Batu Jaya	24	42	4	1	-	-
12	Rengat Barat	48	66	2	-	-	-
13	Rengat	28	12	1	-	1	-
14	Kuala Cenaku	20	23	2	-	-	-
	INDRAGIRI HULU	399	544	14	2	1	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan tersedianya prasarana peribadatan akan mendukung upaya peningkatan keagamaan bagi masyarakat setempat

E. Status Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu memiliki banyak mata pencaharian.

Tabel II. 3

Status Pekerjaan Utama Penduduk Berumur 15 Tahun keatas /(Jiwa)

NO	STATUS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Berusaha dibantu buruh tetap/Dibayar	11 182
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	32 524
3	Berusaha Sendiri	36 345
4	Buruh/Karyawan	75 729
5	Pekerja bebas	10 106
6	Pekerja Keluarga	26 906

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan tabel diatas masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu banyak berprofesi sebagai Buruh/Karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

F. Jumlah Pemilih Kabupaten Indragiri Hulu

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar pada pemilihan, dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hulu memiliki Pemilih antar kecamatan sebagai berikut :

Tabel II.4

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Serentak Lanjutan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMAH TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT		
				LK	PR	JUMLAH
1	Rengat	16	124	17.431	17.632	35.063
2	Rengat Barat	18	108	16.355	15.557	31.912
3	Seberida	11	119	18.986	18.231	37.217
4	Batang Gansal	10	71	9.594	8.985	18.579
5	Batang Cenaku	20	90	13.859	13.190	27.049
6	Peranap	12	78	11.227	10.704	21.931
7	Kelayang	17	66	8.690	8.447	17.137
8	Lirik	17	62	9.293	8.878	18.171
9	Pasir Penyu	13	80	12.043	12.027	24.070
10	Kuala Cenaku	10	34	5.128	4.858	9.986
11	Batang Peranap	10	34	4.516	4.245	8.761
12	Rakit Kulim	19	62	7.746	7.317	15.063
13	Sungai Lala	12	37	5.662	5.452	11.114
14	Lubuk Batu Jaya	9	56	7.902	7.530	15.432
JUMLAH		194	1021	148.432	143.053	291.485

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel II.4 KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Jumlah DPT di Indragiri Hulu adalah 291.485 Dengan Rincian Pemilih Sebagai Berikut : 148.432 pemilih Laki-laki dan 143.053 Pemilih Perempuan yang tersebar di 1021 TPS, di 194 Desa/Kelurahan.²⁸

G. Organisasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari beberapa bagian yang dipimpin oleh seorang Bupati serta dibantu oleh sejumlah bagian yang sesuai dengan profesinya. Adapun susunan organisasi dan Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Bupati Kab. Indragiri Hulu selaku kepala wilayah
2. Wakil Bupati Kab. Indragiri Hulu
3. Sekretariat Daerah (Setda)
4. Sekretariat DPRD
5. Inspektorat
6. Asisten Praja (I)
 - 1) Bagian Humas
 - 2) Bagian Tata Hukum
 - 3) Bagian Tata Pemerintahan

²⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, <https://www.google.com/search?q=kpuinhu&oq=kpuinhu&aqs=chrome..69i57j35i39.2560j7surc&idchrome&ie=UTF8#> di akses pada tanggal 9 maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Asisten Ekonomi & Pembangunan (II)

- 1) Bagian Ekonomi
- 2) Bagian Pembangunan
- 3) Bagian Bina Sosial

8. Asisten Administrasi (III)

- 1) Bagian Keuangan
- 2) Bagian Pembangunan
- 3) Organisasi
- 4) Bagian Umum dan Perlengkapan
- 5) Badan
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- 7) Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
- 8) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)
- 9) Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
- 10) Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (Bapemades)
- 11) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Infokom
- 12) Badan Pendidikan dan Pelatihan

9. Dinas

- 1) Dinas Pendapatan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Dinas Pendidikan
- 3) Dinas Perhubungan
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Penduduk
- 6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural, Peternakan dan Perikanan
- 7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 8) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
- 9) Dinas Pertambangan dan Energi
- 10) Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata
- 11) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
- 12) Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana
- 13) Dinas Pertahanan
10. Satuan polisi pamog praja
11. Kecamatan
12. Kelurahan

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan..menurut tafsir R.Krenenburg,bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat²⁹

²⁹B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hlm.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa para ahli mendefenisikan demokrasi sebagai berikut :

Dalam buku Dictionary Webster , Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat dan langsung dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.³⁰

Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan- keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah- masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.³¹

Menurut Joseph A. Scherer ,Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Menurut Abraham Lincoln Demokrasi, sebagai government of the people, by the people and for the people.³²

Dalam buku governing building and building government oleh Bryan D.Jones lebih tegas mengatakan bahwa demokrasi ialah suatu

³⁰ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), Hlm.27

³¹ *Ibid*

³² Abd.Muih, *Arah Baru Demokrasi Indonesia*, (Jakarta Timur: Lecture Publisher Kelompok PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2013), Hlm 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan yang di organisasikan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, dan kekuasaan mayoritas.³³

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

- 1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
- 2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- 3) Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
- 4) Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai
- 5) Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
- 6) Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik

³³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandement UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm, 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

- 1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan
- 2) Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat
- 3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
- 4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau Negara
- 5) Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara Terdapat berbagai sumber informasi
- 6) Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil;
- 7) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl menyatakan delapan hal yang perlu tercerminkan pada demokrasi, antara lain:

- 1) Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi(berserikat dan berkumpul)
- 2) Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
- 3) Hak memilih dan dipilih
- 4) Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
- 5) Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan
- 6) Pemilu yang bebas dan adil
- 7) Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung

- 8) suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

2. Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya :³⁴

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum .
- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- 3) Pemancaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4) Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol. Kejujuran dan terbuka untuk umum
- 5) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

B. Teori Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,

³⁴ Sarja, *Op Cit*, Hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁵

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia untuk memilih pemimpin rakyat atau pemimpin Negara yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.³⁶

Beberapa para ahli mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut :

1. Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.
2. Menurut A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak- hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁶ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997), Hlm.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Selain dari definisi di atas Morrisan (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.³⁷
4. Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Sebuah pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin politik. Yang dimaksud pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, maupun bupati.

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil- wakilnya untuk menjalankan

³⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan.³⁸

Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

1 Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2 Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

3 Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu .

4 Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang

³⁸ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), Hlm. 12

dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

5 Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

6 Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

7 Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

8 Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

- 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.³⁹

Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abash (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik.⁴⁰

2. Asas-asas Pemilihan Umum

Dalam pemilu terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu.

Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

³⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴⁰ Parulian Donald, *Op Cit*, Hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Pilkada

Menurut PKPU No 13 tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala daerah dipilih melalui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

- 1) Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dilakukan secara langsung.

- 2) Pilkada merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Pilkada sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- 4) Pilkada sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.
- 5) Pilkada merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada ini.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 Ayat (1) mengenai mekanisme tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdiri dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masapersiapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang tercantum pada Pasal 65 Ayat (2) meliputi:⁴¹

- a) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhir masa jabatan;
- b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c) Perencanaan penyelenggaraan;
- d) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS;
- e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Kemudian pada tahap pelaksanaan pemilukada sebagaimana tercantum pada Pasal 65 Ayat (3) meliputi :

- a) Penetapan daftar pemilih;
- b) Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah;
- c) Kampanye;
- d) Pemungutan suara;
- e) suara;
- f) Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.⁴²

Pada tahap persiapan, tahapan yang juga menjadi salah satu tahapan yang cukup menentukan hasil dalam sebuah pemilihan, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah adalah tahap kampanye. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang penyelenggaraan pilkada, kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴² Ibid

pemilihan, kampanye diselenggarakan diseluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada.

4. Kampanye

Pengertian Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.⁴³

Beberapa definisi Kampanye menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Kotler dan Roberto Kampanye ialah Sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok atau agen perubahan yang ditunjukkan untuk memengaruhi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide sikap dan perilaku tertentu Oleh karena itu kampanye bisa dikatakan sebuah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu pada periode tertentu guna untuk mencapai tujuan tertentu .
2. Menurut Ujar Sweeney ,Kampanye seperti sebuah perjalanan yang dimulai dari satu. dan berakhir pada titik lainnya untuk sampai pada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat di sini orang memerlukan

⁴³ Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2020, *Op.Cit.* Hlm,8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye⁴⁴

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka unsur kampanye terdapat 4 hal yakni:

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat dimaknai bahwa kampanye adalah merupakan kegiatan atau aktivitas mempromosikan satu atau beberapa hal kepada khalayak atau publik agar mereka mengenalnya. Jika ia berupa barang maka orang diharapkan membelinya. Jika ia berupa jasa publik diharapkan untuk menggunakan jasanya, kampanye berhubungan dengan upaya untuk mengaruhi dari intensitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang dipengaruhi memiliki kesamaan pandangan sikap dan prinsip yang dipengaruhi.⁴⁵

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber yaitu⁴⁶

1. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan

⁴⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2018), Hlm 204

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Dan Nmmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. (Bandung: Rosda. 2009) Hlm 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Hal ini dilakukan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya.

2 *Candidate oriented campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya didominasi motivasi karena hasrat untuk kepentingan politik :kampanye politik ,kampanye penggalangan dana bagi partai politik.

3 *Ideologically or cause oriented campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial dan social change campaigns, yakni kampanye yang ditujukan untuk mengenai masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku, contohnya :kampanye AIDS, keluarga berencana dan donor darah.

4 Kampanye yang bersifat menyerang (*attacking campaign*)

1) Kampanye Negatif

Menyerang pihak lain untuk berdebat dengan data dan fakta .

2) Kampanye Hitam

Kampanye yang bersifat buruk dan jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan.

3) Kampanye terselubung

Didefinisikan sebagai tindakan politik mempengaruhi calon pemilih di luar masa dan jadwal kampanye resmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam pelaksanaan kampanye tidak terlepas dari beberapa hal, sebagai berikut:

1. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
2. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
3. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.⁴⁷

C. Teori Strategi Pemenangan

1. Pengertian Strategi Pemenangan

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962) yaitu “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan ,serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi politik merupakan suatu analisis tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon pemilu presiden atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya. Banyak faktor yang mempengaruhi proses ini, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun ke daerah), mesin-mesin politik yang ada (organisasi sosial politik/kelompok kepentingan baik partai politik, Organisasi Kepemudaan, dan Media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan dalam pemilu.

Dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut, tahapan persiapan ataupun tahapan pelaksanaan diatur oleh KPUD dan untuk selanjutnya akan berpedoman pada PP No. 6 tahun 2005. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa

⁴⁷ Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2020, *Loc.Cit.* Hlm.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan calon berhak untuk melakukan kampanye sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan pilkada dengan jadwal yang ditentukan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi serta semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun, termasuk di dalamnya partai politik, membutuhkan pendekatan alternatif dalam kampanye. Dalam konteks inilah marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang berkembang di dunia bisnis diasumsikan berguna bagi institusi politik (Firmanzah 2010:127).⁴⁸

Menurut Lock dan Harris (Firmanzah 2009:275) kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat. Faktor utama penyebab seseorang bisa meraih kemenangan adalah sejauh mana kemampuannya dalam mencitrakan diri sehingga masyarakat mengenalnya dan bersimpati padanya. Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menjadi pemenang. Ada strategi yang positif (sesuai dengan aturan) dan ada juga yang negatif, seperti: money politic, black campaign, manipulasi suara dan sederet kecurangan lainnya. Di antara strategi yang kerap dimainkan dalam

⁴⁸ Bowo Sugianto, Dkk, *Strategi Pemenangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 27 No 14, 2014, Hlm.145

kompetisi.

Politik baik pada pemilu anggota legislatif, pilpres atau pemilu kepala daerah adalah mengangkat sebuah opini dan isu yang menyita perhatian publik dan menimbulkan simpati bagi para pemilih. Selain itu, ada juga strategi kampanye dengan menempatkan figur atau tokoh di balik partai, ideologi atau kepentingan, dan janji yang diusung.

2. Macam Strategi Pemenangan

Di dalam pemilihan Strategi pemenangan merupakan factor yang perlu di persiapkan untuk memenangkan. Adapun strategi pemenangan sebagai berikut:

1. Konsolidasi partai dan tim sukses

Perencanaan merupakan bagian yang paling krusial agar tujuan yang diharapkan tercapai. Konsolidasi partai dan tim kampanye merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. *Segmentasi, targetting, positioning*

Segmentasi pada dasarnya digunakan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok khalayak yang berguna untuk mencari peluang, menggerogoti kelompok lawan berdasarkan kecenderungan pilihan, preferensi, keinginan, cita rasa, gaya hidup, sistem nilai bahkan sampai pada persoalan pribadi.

Targetting digunakan untuk memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran obyektif. *Targetting* juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Khalayak sasaran yang dipilih oleh tim sukses kandidat adalah individu-individu yang masih ada pada posisi belum memiliki pilihan terhadap salah satu pasangan calon baik pemilih lama maupun pemilih pemula

Positioning merupakan atribut pembeda yang membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya

3. Pencitraan pasangan calon bupati

Terbatasnya waktu kampanye yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum memaksa pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta tim kampanyenya untuk merencanakan Strategi politik secara efektif agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Jenis komunikasi yang dianggap sesuai untuk memenuhi kebutuhan itu adalah komunikasi massa, sehingga saluran komunikasi yang banyak digunakan adalah media massa. Media massa dimanfaatkan oleh tim sukses dari setiap pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan citra diri positif dari pasangan calon tersebut di masyarakat. Proses pencitraan lewat media massa itu dilakukan berulang-ulang sehingga pada akhirnya akan melekat di pikiran pemilih dan mendorong mereka untuk memilih calon kepala daerah tersebut.²⁶

Selanjutnya ,agar berjalanya strategi pemenangan,komunikasi politik hal utama yang menjadi factor agar tersampai pesan dalam kampanye.komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan actor-actor politik ,atau berkaitan dengan kekuasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

,pemerintahan dan kebijakan pemerintahan.

Factor-faktor politik dari proses komunikasi politik meliputi :

1 Komunikator politik

Komunikator politik adalah partisipasi yang dapat menyampaikan atau memberikan informasi tentang hal yang mengandung makna atau bobot politik

2 Pesan politik

Pesan politik adalah pernyataan yang di sampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupaun nonverbal, sembunyi dan terang terangan, baik yang di sadari maupun tidak di sadari yang di dalamnya mengandung isi politik.

3 Saluran atau media politik

Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang di harapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara(vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam sub-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan :

Dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 mengutamakan Media Social dan Media Daring, Tetapi jika Partai Politik, Tim Kampanye/ Pasangan Calon tidak dapat melaksanakan dengan Media Social dan Media Daring di karenakan sebagian Daerah yang tidak bisa mengakses atau di luar jangkauan media social dan media daring ,maka dapat memanfaatkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog yang di lakukan dalam ruangan atau gedung yang di hadiri maksimal 50 orang serta memperhatikan pertokol kesehatan yaitu menjaga jarak paling kurang 1 meter menggunakan APD paling kurang berupa masker dan menutupi hidung hingga dagu ,menyediakan sarana sanitasi fasilitas cuci tangan dengan perlengkapan dan memerhatikan protocol kesehatan lainnya. Tidak terlepas sebelum melaksanakan kampanye Partai Politik, Tim Kampanye/ Pasangan Calon wajib memiliki STTP (Surat Tanda Terimah Pemberitahuan) Kampanye yang di dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian.

Tindakan atas pelanggaran kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 mengatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang sanksi administratif di antaranya sanksi surat peringatan, sanksi pemberhentian paksa dan sanksi tidak di berikan izin untuk berkampanye dalam kurun waktu 3 (tiga) hari .Untuk temuan pelanggaran yang ada di Kecamatan Peranap yang di lakukan oleh pada pasangan calon No urut 2 Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rahmat melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a dan b PKPU No 13 Tahun 2020,Kecamatan Batang Cenaku yang di lakukan pasangan calon Pasagan Calon Nomor Urut 04 Wahyu Adi-Suriati yang melanggar Pasal 58 huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 yaitu berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP dan Kecamatan Pasir Penyu yang di lakukan Pasangan calon Nomor urut 5 yakni Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 dan tanpa STTP “dimana Panwascam sebagai pihak yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan telah memberikan peringatan tertulis dan berakhir dengan pembubaran kampanye.

B. Saran

Disarankan kepada Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon untuk memahami dengan baik isi PKPU No 13 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk melaksanakan kampanye.Hal ini bertujuan untuk terciptanya Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil serta memperhatikan keselamatan masyarakat dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Disarankan kepada KPU untuk memberian sanksi yang tegas seperti sanksi diskulifikasi kepada Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon

tanpa adanya formalitas sanksi tertulis yang memperpanjang penyelesaian masalah guna memberikan peringatan agar tidak melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan kampanye.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Donald Parulian, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997.
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010 .
- Handoyo B.Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara ,kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Hasibuan Rezky Panji Perdana Martua, *Urgensitas Perpu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19* ,Jurnal Volume 4, No. 1, 2020.
- Hoboddin Muktar, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, Malang: UB Press, 2012
- Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Karim M. Rusli, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010.
- Masri Singaribun, Efendi, *Metode Penelitian Social*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- N Abd. Muhih, *Arah Baru Demokrasi Indonesia*, Jakarta Timur: Lecture Publisher Kelompok PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2013.
- Nimmo Dan, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Rosda, 2009.
- Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016.
- Satopo HB, *Metode Penelusuran Kuantitatif*, Surakarta: UN Press, 1999.
- Setiawan Irfan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018 .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singgih Choiril Rizki dan Yusuf Adam Hilman, Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada serentak di tengah Covid 19, Jurnal Volume 4, No 2, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006.

Sugianto Bowo Dkk, *Strategi Pemenangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 27 No 14, 2014.

Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandement UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarugatan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid- 19).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Koimisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nomalam corona virus disease 2019 (Covid 19).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

<https://m.halloriau.com/read-131201-2020-06-13-kpu-resmikan-jadwal-pilkada-serentak-2020-kampanye-mulai-26-september>, di akses pada 13 Juni 2020.

<https://indragirihulu.bawaslu.go.id/>, di akses pada 24 November 2020.

<https://www.riauin.com/amp/read-18567-2020-10-16-bawaslu-proses-23-pelanggaran-kampanye-9-pilkada-di-riau.html>, di akses pada 16 Oktober 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.gatra.com/detail/news/494833/politik/ssst-ada-pelanggaran-pemilu-di-inhu>, di akses pada 07 November 2020.

[http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1507844423RPIJM_Inhu - BAB 2 Profil Kab-Kota.pdf](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1507844423RPIJM_Inhu_-_BAB_2_Profil_Kab-Kota.pdf).Di akses pada tanggal 13 Januari 2020)

<https://inhukab.go.id/tentang-inhu/> ,Di akses Tanggal 13 Januari 2021.

<https://inhukab.bps.go.id/>. Badan statistik Kabupaten Indragiri Hulu,Di akses pada tanggal 13 Januari 2020.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO



Foto wawancara dengan ketua KPU Indragiri Hulu



foto penulis dengan camat kecamatan peranap

Foto penulis dalam pengumpulan data di kecamatan pasir penyu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

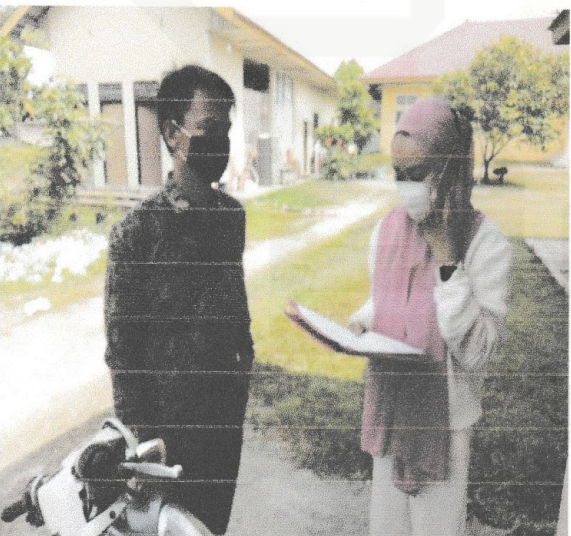
Foto penulis pengumpulan data di kecamatan batang cenaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto penulis wawancara di kecamatan peranap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI COVID-19”** yang ditulis oleh :

Nama : **MEGA WARDANI**
 NIM : **11720725026**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Rabu, 28 Juli 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring / Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
 Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. H.Maghfirah, MA

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah,SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKILWALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANANONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU ,ditulis oleh saudara :

Nama :Mega Wardani
NIM :11720725026
Program Studi :Ilmu Hukum

Diseminarkan pada

Hari / Tanggal :Selasa,29 Desember 2020
Narasumber :Syaftrinaldi,S.H.,M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,14 Januari 2021
Narasumber

Jalinus, S.Ag.
NIP.19750801 200701 1 023

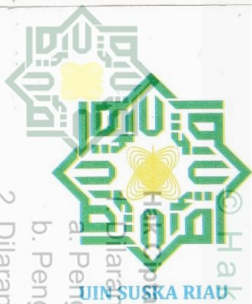
Syaftrinaldi,S.H.,M.H.
NIP.19810923 200604 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6985/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MEGA WARDANI
NIM	: 11720725026
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hal : **Mohon Izin Riset**

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/37616
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/6985/2020** Tanggal **7 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

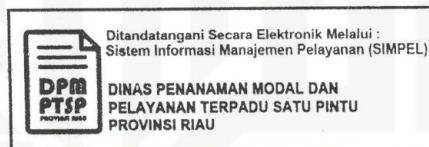
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MEGA WARDANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720725026 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHANKEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KOMISIPEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKILWALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAMKONDISIBENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

R E N G A T

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 6/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/I/2021

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 18 Januari 2021 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MENIMBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37616 tanggal 13 Januari 2021
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **MEGA WARDANI**
 2. Nomor Induk Mahasiswa : **11720725026**
 3. Alamat : **DUSUN KELAPA SAWIT RT/RW 018/005 KEL/DESA RUMBAI KEC. KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR**
 4. Kebangsaan : **INDONESIA**
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
1. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI COVID 19 DI INHU**
 2. Lokasi Penelitian : **1. KPU KAB. INDRAGIRI HULU 2. KANTOR DESA SE KECAMATAN AIR MOLEK KEC. PASIR PENYU, KECAMATAN PERANAP DAN KECAMATAN BATANG CENAKU**
 3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
 4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
 5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 21 Januari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



AHMAD FAHMI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720311 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU;
3. Arsip.



Ralat
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KECAMATAN PASIR PENYU

Jl. Nila Pahlawan No. 01 Telp. (0769) 41059 Air Molek 29352

REKOMENDASI

Nomor : 460/Pemas-rekom/01

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN KARYA ILMIAH

Camat Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, setelah membaca Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 6/DPMTSP/NON IZIN-SKP/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MEGA WARDANI
 Nim : 11720725026
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : DUSUN KELAPA SAWIT RT. 018/RW.005 KEL/DESA RUMBAI KECAMATAN KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR

Judul Penelitian : PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI COVID 19 DI INHU

Lokasi Penelitian : KECAMATAN PASIR PENYU

Waktu Penelitian : 6 (ENAM) BULAN
 Status Penelitian : PERSEORANGAN
 Nama Lembaga : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DI UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporan kepada Penjabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian.
2. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.
3. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.
5. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Ditetapkan di : Air molek
 Tanggal : 25 Januari 2021

An. CAMAT PASIR PENYU
 Kasi Pemberdayaan Masyarakat

GUSMANTO, A.Md

NIP. 19780803 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG CENAKU
 Jalan Lintas Selatan No. 86 Kode Pos 29373B1
AUR CINA

REKOMENDASI
NO : 130/PM-BC/120

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, setelah membaca surat Rekomendasi Riset dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 6/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/I/2021, dengan ini memberikan Rekomendasi :

Nama	: MEGA WARDANI.
NIM	: 11720725026.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Jenjang/Program Studi	: S 1/ILMU HUKUM.
Alamat	: Dusun Kelapa Sawit RT/RW 018/005 KEL/Desa Rumbai Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir.
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI COVID 19 DI INHU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan selesai.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Camat Batang Cenaku Kab. INHU selambat-lambatnya 6(enam) bulan selesai penelitian.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aur Cina
 Pada tanggal : 19 Februari 2021.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KECAMATAN PERANAP

Jalan Jenderal Sudirman No. 111 Peranap, Telepon (0760) 561088

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/PM/ 70

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 6/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan pra riset/riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama	: MEGA WARDANI
Jenjang	: S-1 (Strata Satu)
Status Peneliti	: Mahasiswa
Judul Peneliti	: Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid-19 di Indragiri Hulu

Dengan Keterangan sebagai Berikut:

1. Tidak Melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan/pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlangsung selama 2 (Dua) Bulan terhitung Tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran penelitian ini, terimakasih.

Peranap, 05 Maret 2021

CAMAT PERANAP,



U M A R, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19630717 198702 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MEGA WARDANI

NIM : 11720725026

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN / ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI COVID 19

Pembimbing: Lovelly Dwina Dahren, S.H.,M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. APRI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Mega Wardani, dilahirkan di Pebenaan pada tanggal 23 Januari 2000. Anak ke pertama ini merupakan putri dari pasangan Suardi dan Suarni, saat ini penulis tinggal di Perumahan Slehta Emas, Jalan Tarai Tampui, Tambang Rimbo

Panjang tepatnya di Kos Putri .Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah DasaR di SD Negeri 011 Pebenaan tamat pada Tahun 2010/2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 2 Keritang tamat pada Tahun 2013/2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Enok kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan Penulis tamat pada Tahun 2016/2017.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan Magang di Pengadilan Negeri (PN) Setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Tanggal 28 Juli 2021 Penulis dinyatakan lulus dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Riau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.